

Untuk diterbitkan segera

Siaran Pers

PPKM Darurat Hari ke-12:

Mobilitas Masyarakat Turun, Pemerintah Minta Dukungan Masyarakat

Jakarta, 14 Juli 2021 – PPKM Darurat yang bertujuan membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan tingkat penularan COVID-19, mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data hasil pantauan, hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat.

“DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%, hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Wilayah Jawa Barat juga mengalami penurunan, meski di wilayah pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi saat menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi PPKM Darurat, Rabu (14/7).

Dedy menyebutkan, pemerintah melalui Koordinator PPKM Darurat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemda, TNI, Polri, Satpol PP, dan tentunya masyarakat yang taat dan patuh menjalankan aturan PPKM Darurat ini sehingga penurunan mobilitas bisa terjadi.

Penurunan ini hendaknya menjadi pemicu untuk lebih optimal lagi. “Koordinator PPKM Darurat mengimbau agar seluruh pihak terus bekerja menekan mobilitas masyarakat hingga minus 30%, dan pada akhirnya mencapai minus 50%,” kata Dedy. Dedy juga mengingatkan bahwa penurunan mobilitas masyarakat merupakan agenda yang betul-betul menjadi prioritas pada saat ini untuk bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 secara signifikan.

Perkembangan Status Kasus dan Vaksinasi

Pada kesempatan itu, Dedy juga menjelaskan tentang perkembangan status kasus COVID-19 dan program vaksinasi di tanah air. "Dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa jumlah kasus baru pada hari ini kembali mencapai jumlah tertinggi selama pandemi, yaitu sebanyak 54.517 kasus baru. Sedangkan untuk kasus aktif pada hari ini mencapai 443.473 kasus. Dengan berat hati juga kami sampaikan hari ini kita kehilangan 991 saudara kita yang meninggal dunia karena COVID-19," kata Dedy.

Peningkatan kasus baru ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mengupayakan yang terbaik, termasuk dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi PPKM Darurat. Dedy kembali mengingatkan, meski mobilitas mulai turun, namun itu belum cukup. Masih perlu diturunkan lagi hingga mencapai 50%.

Yang tak kalah penting adalah untuk terus meningkatkan jumlah masyarakat yang divaksinasi. Hingga Selasa (13/7) pukul 18.00 WIB, sekitar 52,3 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 37 juta orang untuk dosis pertama dan 15,3 juta orang untuk dosis kedua, dari total 208,2 juta orang yang menjadi sasaran vaksinasi.

"Masyarakat kami mohon untuk tidak ragu dengan vaksin yang ada. Vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia. Badan POM dan WHO sudah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat," kata Dedy.



Pemerintah juga terus menjaga ketersediaan stok vaksin. Hingga 13 Juli, Indonesia telah menerima sekitar 137,6 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Dalam tiga hari ke depan, akan datang lagi tambahan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral.

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Narahubung: Lalu Hamdani
No HP 081284519595